



Tabayyun as the Ethics of Information Verification: A Thematic Exegetical Analysis of Quranic Surah Al-Hujurat: 6 Regarding Disinformation on Social Media

Tabayyun sebagai Etika Verifikasi Informasi: Analisis Tafsir Tematik QS. Al-Hujurat: 6 Terhadap Disinformasi di Media Sosial

Yasna Silmi Zhahira, Ahmad Nurrohim

Universitas Muhammadiyah Surakarta

g100230090@student.ums.ac.id

an122@ums.ac.id

Received: 02 – 06 – 2026 Accepted : 17 – 07 – 2026 Published: 31 – 08 – 2026

Abstract

The spread of disinformation on social media highlights the importance of an information verification model grounded in Qur'anic values. This study aims to analyze the concept of tabayyun in QS. Al-Hujurat verse 6 through a thematic interpretation approach and to formulate a conceptual framework for Qur'an-based information verification. This qualitative study employs library research using the tafsir maudhu'i method by examining the Qur'an and classical and contemporary tafsir literature. The findings show that a synthesis of the interpretations of Qur'anic exegetes produces four main principles of information verification: source credibility, information clarification, fact validation, and moral responsibility. These four principles are formulated into the Qur'anic Verification Framework as a conceptual model of Qur'an-based information verification. The novelty of this study lies in formulating the Qur'anic Verification Framework as a result of tafsir synthesis that systematically integrates these four principles, positioning tabayyun not only as an ethical principle of communication but also as a mechanism for information verification encompassing source, content, factual validity, and dissemination responsibility. This study contributes to thematic Qur'anic interpretation and provides a conceptual foundation for developing Islamic digital ethics and digital literacy in addressing disinformation.

Keywords: *Tabayyun, Disinformation, Social Media, Maudhu'i Interpretation, Islamic Digital Ethics.*

Abstrak

Penyebaran disinformasi di media sosial menunjukkan pentingnya model verifikasi informasi yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan menganalisis

konsep *tabayyun* dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 melalui pendekatan tafsir tematik serta merumuskan kerangka konseptual verifikasi informasi berbasis Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) melalui metode *tafsir maudhu'i* terhadap Al-Qur'an dan kitab tafsir klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sintesis penafsiran para mufasir menghasilkan empat prinsip utama verifikasi informasi, yaitu *source credibility*, *information clarification*, *fact validation*, dan *moral responsibility*. Keempat prinsip tersebut diformulasikan menjadi *Qur'anic Verification Framework* sebagai model konseptual verifikasi informasi berbasis Al-Qur'an. Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi *Qur'anic Verification Framework* sebagai hasil sintesis tafsir yang mengintegrasikan keempat prinsip tersebut secara sistematis, sehingga *tabayyun* diposisikan tidak hanya sebagai prinsip etika komunikasi, tetapi juga sebagai mekanisme verifikasi informasi yang mencakup sumber, isi, validitas fakta, dan tanggung jawab penyebaran. Kontribusi penelitian ini adalah memperluas kajian tafsir tematik serta menyediakan landasan konseptual bagi pengembangan etika dan literasi digital Islam dalam menghadapi disinformasi.

Kata Kunci: *Tabayyun*, Disinformasi, Media Sosial, Tafsir *Maudhu'i*, Etika Digital Islam.

Pendahuluan

Perkembangan media sosial di era digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat menjadi lebih cepat, terbuka, dan masif. Platform seperti Instagram, Facebook, X, dan TikTok tidak hanya berfungsi sebagai sarana interaksi sosial, tetapi juga menjadi ruang utama produksi dan distribusi informasi publik.¹ Kemudahan akses dan kecepatan penyebaran informasi tersebut memberikan berbagai manfaat dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial. Namun, pada saat yang sama, media sosial juga menjadi sarana penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, serta manipulasi opini publik yang semakin sulit dikendalikan. Fenomena ini dikenal dalam kajian komunikasi kontemporer sebagai *information disorder*, yaitu gangguan informasi yang mencakup *misinformation* (informasi salah yang disebarkan tanpa niat menyesatkan), *disinformation* (informasi salah yang disebarkan secara sengaja), dan *malinformation* (informasi yang benar tetapi digunakan untuk merugikan pihak tertentu). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi informasi tidak selalu diiringi dengan kematangan etika komunikasi dan kemampuan literasi digital masyarakat dalam

¹ Hunt Allcott and Matthew Gentzkow, "Social Media and Fake News in the 2016 Election," *Journal of Economic Perspectives* 31, no. 2 (2017): 211–36.

Tabayyun sebagai Etika Verifikasi Informasi: Analisis Tafsir Tematik QS. Al-Hujurat: 6 terhadap Disinformasi di Media Sosial

memverifikasi kebenaran informasi yang diterima sebelum menyebarkannya kepada orang lain.²

Dalam perspektif Islam, verifikasi informasi merupakan bagian penting dari etika komunikasi dan tanggung jawab sosial. Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap pentingnya kehati-hatian dalam menerima berita agar tidak menimbulkan kerugian, fitnah, maupun konflik di tengah masyarakat. Salah satu konsep yang menjadi landasan utama etika informasi dalam Islam adalah *tabayyun*.³ Konsep ini secara eksplisit disebutkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 sebagai pedoman bagi umat Islam untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap setiap informasi yang diterima. Allah Swt. berfirman:

فَعَلَّمْ مَا عَلَىٰ فَتُصْحِحُوا بِجَهَالَةٍ ۖ قَوْمًا تُصِيبُوا أَنْ فَتَيَّبُنَا بَنِي ۖ فَاسِقٌ جَاءَكُمْ إِنْ أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
نُدْمِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat [49]: 6).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa verifikasi informasi bukan sekadar tindakan teknis, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial yang harus dilakukan sebelum mengambil keputusan berdasarkan suatu berita. Konsep *tabayyun* mengandung dimensi teologis sekaligus epistemologis karena berkaitan dengan proses memperoleh pengetahuan yang benar, pengujian validitas informasi, serta pencegahan dampak negatif yang ditimbulkan oleh informasi yang tidak terverifikasi.⁴ Para mufasir klasik seperti Ath-Tabari dan Ibnu Katsir menafsirkan

² Claire Wardle and Hossein Derakhshan, *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policymaking*, vol. 27 (Council of Europe Strasbourg, 2017).

³ Anisa Nur Izzati Sukmaningtyas et al., "Etika Komunikasi Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Komunikasi Di Zaman Modern," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 556–76.

⁴ Amalia Naim Afifah et al., "Transformation of Al-Qur'an Interpretation in the Digital Era: A Comparative Analysis Study of the Content of the Altafsir. Com Website with the Al-Qur'an Al-Hadi Website," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 8, no. 1 (2025): 1047–68.

ayat ini sebagai perintah untuk berhati-hati terhadap berita yang berasal dari sumber yang tidak kredibel dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sementara itu, mufasir kontemporer seperti M. Quraish Shihab menegaskan bahwa *tabayyun* merupakan prinsip universal yang relevan diterapkan dalam berbagai bentuk komunikasi modern, termasuk dalam menghadapi arus informasi yang sangat cepat di media sosial.⁵ Dengan demikian, *tabayyun* tidak hanya dipahami sebagai ajaran moral keagamaan, tetapi juga sebagai prinsip verifikasi informasi yang memiliki relevansi kuat dalam konteks komunikasi digital kontemporer.⁶

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji konsep *tabayyun* dalam kaitannya dengan media sosial, literasi digital, etika komunikasi Islam, dan kajian tafsir QS. Al-Hujurat ayat 6. Meskipun menggunakan objek kajian dan pendekatan yang beragam, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan kecenderungan yang relatif sama, yaitu memosisikan *tabayyun* sebagai prinsip etika komunikasi yang berfungsi mencegah penyebaran hoaks, memperkuat literasi digital, dan membangun perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab. Sementara itu, kajian tafsir lebih banyak berfokus pada penjelasan makna *tabayyun* berdasarkan perspektif mufasir tertentu serta relevansinya terhadap kehidupan sosial-keagamaan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa nilai *tabayyun* memiliki relevansi yang kuat dalam merespons persoalan komunikasi di era digital. Namun, kecenderungan tersebut juga memperlihatkan bahwa pembahasan *tabayyun* masih didominasi oleh perspektif normatif dan etis, sehingga dimensi epistemologisnya sebagai mekanisme verifikasi informasi belum dikembangkan secara memadai menjadi suatu kerangka konseptual yang sistematis.⁷

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat tiga ruang yang belum dikembangkan secara memadai. Pertama, *tabayyun* belum banyak direkonstruksi sebagai model konseptual verifikasi informasi yang secara sistematis menjelaskan tahapan

⁵ Ahmad Nurrohim, *Ilmu Tafsir* (Muhammadiyah University Press, 2024).

⁶ M Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah," *Jakarta: Lentera Hati* 2 (2002): 52–54.

⁷ Ipmawan Muhammad Iqbal, Aulia Nurul, and Siti Rokhani, "Penafsiran Tabayyun Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Mishbah," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4523–32.

pemeriksaan berita. Kedua, kajian terhadap QS. Al-Hujurat ayat 6 belum banyak mensintesis penafsiran mufasir klasik dan kontemporer untuk menghasilkan konstruksi konseptual yang terintegrasi. Ketiga, hubungan antara dimensi epistemologis dan etis dalam *tabayyun* belum dirumuskan secara utuh, khususnya dalam menghubungkan penilaian sumber, klarifikasi informasi, validasi fakta, dan tanggung jawab dalam penyebaran informasi. Dengan demikian, *research gap* penelitian ini terletak pada belum adanya rekonstruksi konseptual terhadap hasil sintesis penafsiran QS. Al-Hujurat ayat 6 yang mengintegrasikan dimensi epistemologis dan etis ke dalam satu kerangka verifikasi informasi berbasis Al-Qur'an.

Penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan memosisikan *tabayyun* tidak hanya sebagai prinsip etika komunikasi, tetapi juga sebagai paradigma verifikasi informasi yang dapat direkonstruksi melalui pendekatan *tafsir maudhu'i*. Sintesis penafsiran mufasir klasik dan kontemporer digunakan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip verifikasi yang kemudian diformulasikan ke dalam *Qur'anic Verification Framework*. Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi kerangka tersebut sebagai hasil sintesis tafsir yang mengintegrasikan empat prinsip, yaitu *source credibility*, *information clarification*, *fact validation*, dan *moral responsibility*, ke dalam satu mekanisme verifikasi informasi yang sistematis. Dengan demikian, nilai tambah penelitian bukan semata-mata pada identifikasi empat prinsip tersebut, melainkan pada rekonstruksi hubungan antarkeempatnya sebagai kerangka konseptual berbasis Al-Qur'an.⁸

Berbeda dengan pendekatan verifikasi informasi yang umumnya berorientasi pada pengujian akurasi atau kebenaran informasi, *Qur'anic Verification Framework* mengintegrasikan proses epistemik berupa penilaian sumber, klarifikasi informasi, dan validasi fakta dengan dimensi etis berupa tanggung jawab dalam penggunaan dan penyebaran informasi. Dengan integrasi tersebut, verifikasi informasi tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu informasi

⁸ Luciano Floridi, *The Ethics of Information* (Oxford University Press (UK), 2013).

benar atau salah, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana informasi diperoleh, dipahami, diuji, dan digunakan secara bertanggung jawab.

Kontribusi penelitian ini terletak pada dua aspek. Secara akademik, penelitian memperluas kajian tafsir tematik dengan menunjukkan bahwa QS. Al-Hujurat ayat 6 dapat direkonstruksi sebagai landasan konseptual bagi verifikasi informasi di era digital. Secara konseptual, *Qur'anic Verification Framework* menghubungkan proses epistemik penilaian sumber, klarifikasi informasi, dan validasi fakta dengan tanggung jawab etis dalam penggunaan dan penyebaran informasi. Kerangka tersebut diharapkan dapat menjadi landasan teoretis bagi pengembangan etika digital dan literasi digital Islam dalam merespons fenomena disinformasi.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *tabayyun* dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 melalui pendekatan tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*) serta merumuskan *Qur'anic Verification Framework* sebagai model konseptual verifikasi informasi berbasis Al-Qur'an melalui sintesis penafsiran mufasir klasik dan kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis melalui metode tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*). Metode ini dipilih karena memungkinkan kajian yang sistematis terhadap konsep *tabayyun* dalam QS. Al-Hujurat [49]:6 melalui penelusuran makna ayat, aspek kebahasaan, *asbāb al-nuzūl*, serta keterkaitannya dengan ayat-ayat lain yang relevan. Analisis mengacu pada tahapan metode *tafsir maudhu'i* yang dirumuskan oleh Musthafa Muslim, meliputi penetapan tema penelitian, pengumpulan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema, penelaahan penafsiran para mufasir, serta penyusunan sintesis penafsiran untuk memperoleh

⁹ Wardle and Derakhshan, *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policymaking*.

pemahaman yang utuh mengenai konsep *tabayyun* dan relevansinya terhadap fenomena disinformasi di media sosial.¹⁰

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Hujurat [49]:6, serta kitab-kitab tafsir yang menjadi landasan utama analisis, yaitu *Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* karya Ibn Kaṣīr, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī, *Mafātīḥ al-Ghayb* karya Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhailī, dan *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Penggunaan kitab-kitab tafsir dari berbagai periode tersebut bertujuan merepresentasikan perspektif tafsir klasik dan kontemporer sekaligus menjadi dasar analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan perkembangan interpretasi konsep *tabayyun* yang kemudian disintesis dalam penyusunan *Qur'anic Verification Framework*. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik yang membahas tafsir tematik, etika komunikasi Islam, literasi digital, serta fenomena disinformasi di media sosial. Seluruh sumber dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas akademik, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, mengidentifikasi konsep-konsep utama dalam QS. Al-Hujurat [49]:6, khususnya konsep *tabayyun* sebagai prinsip verifikasi informasi. Kedua, menganalisis penafsiran para mufasir melalui kajian komparatif terhadap sumber-sumber tafsir primer dengan memperhatikan aspek kebahasaan, *asbāb al-nuzūl*. Ketiga, menyintesis hasil penafsiran untuk merumuskan prinsip-prinsip *tabayyun* sebagai etika verifikasi informasi dalam perspektif Al-Qur'an. Keempat, mengontekstualisasikan prinsip-prinsip tersebut dengan fenomena disinformasi di media sosial melalui kajian literatur yang relevan. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik *content analysis* dengan pendekatan interpretatif-kontekstual sehingga penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pandangan para mufasir, tetapi juga menghasilkan sintesis

¹⁰ Nur Hanifah, "Metodologi Tafsir Tematik," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 9, no. 2 (2024): 71–83.

konseptual yang menjadi dasar perumusan *Qur'anic Verification Framework* sebagai model verifikasi informasi berbasis Al-Qur'an.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep *Tabayyun* dalam QS. Al-Hujurat Ayat 6 dalam Perspektif Mufasir

Konsep *tabayyun* dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 berangkat dari akar kata ب-ي-ن (*ba-ya-na*) yang bermakna jelas, terang, atau tampak. Menurut Ibnu Manzur dalam *Lisān al-'Arab*, *tabayyana* berarti mencari dan memastikan kejelasan suatu perkara melalui proses pemeriksaan, sedangkan Al-Raghib al-Asfahani memaknainya sebagai upaya memperoleh kepastian dan menghilangkan keraguan terhadap suatu informasi. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 digunakan bentuk *fatabayyanū* (فَتَبَيَّنُوا), yaitu fi'il amr yang menunjukkan perintah untuk memeriksa dan memastikan kebenaran suatu berita sebelum mengambil keputusan. Secara kebahasaan, makna tersebut menjadi titik awal dalam memahami konsep *tabayyun*. Akan tetapi, pemaknaannya berkembang lebih luas melalui penafsiran para mufasir yang mempertimbangkan konteks turunnya ayat, tujuan syariat, dan relevansinya terhadap kehidupan sosial.

Mayoritas mufasir menjelaskan bahwa QS. Al-Hujurat ayat 6 turun berkaitan dengan peristiwa pengutusan Al-Walid bin Uqbah oleh Nabi Muhammad saw. kepada Bani al-Musthaliq untuk mengambil zakat. Kesalahpahaman yang terjadi dalam peristiwa tersebut hampir menyebabkan diambilnya keputusan yang tidak tepat sebelum dilakukan klarifikasi. Konteks turunnya ayat ini menjadi pijakan penting dalam penafsiran para mufasir karena menunjukkan bahwa perintah *fatabayyanū* tidak hanya bermakna mencari kejelasan secara bahasa, tetapi juga mengandung tuntutan untuk memverifikasi informasi sebelum mengambil keputusan yang dapat berdampak kepada pihak lain. Oleh karena itu, konteks historis tersebut menjadi titik tolak bagi para mufasir klasik dan kontemporer dalam

merumuskan makna *tabayyun*, meskipun masing-masing memberikan penekanan yang berbeda sesuai dengan pendekatan tafsir yang digunakan.¹¹

1. Penafsiran Ulama Klasik terhadap Konsep Tabayyun

Konsep *tabayyun* dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 memperoleh perhatian besar dari para mufasir klasik karena berkaitan dengan keabsahan dan validitas informasi. Penafsiran mereka tidak hanya menjelaskan makna kebahasaan ayat, tetapi juga menunjukkan bahwa verifikasi informasi merupakan prinsip yang harus diterapkan sebelum seseorang memberikan penilaian atau mengambil tindakan terhadap pihak lain.

Al-Ṭabarī dalam *Jāmi' al-Bayān* menjelaskan bahwa perintah *fatabayyanū* merupakan kewajiban untuk memeriksa kebenaran berita yang datang dari seorang *fāsiq* agar tidak terjadi kesalahan dalam penilaian maupun tindakan terhadap suatu kaum. Menurutnya, informasi yang berasal dari sumber yang tidak memiliki integritas tidak dapat langsung diterima, melainkan harus melalui proses penelitian dan klarifikasi terlebih dahulu. Penafsiran ini menunjukkan bahwa proses verifikasi menurut al-Ṭabarī dimulai dari evaluasi terhadap kredibilitas pembawa informasi. Dengan demikian, keabsahan suatu berita tidak hanya ditentukan oleh isi informasi, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan terhadap sumber yang menyampaikannya.¹²

Pandangan tersebut diperkuat oleh al-Qurṭubī dalam *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Menurutnya, QS. Al-Hujurat ayat 6 menjadi landasan normatif bagi sikap kehati-hatian dalam menerima berita karena keputusan yang dibangun atas informasi yang belum jelas kebenarannya dapat menimbulkan fitnah, ketidakadilan, dan kerusakan sosial. Berbeda dengan al-Ṭabarī yang lebih menekankan kredibilitas pembawa berita, al-Qurṭubī

¹¹ Paris Ahmad Fauzi, Hammad Mutawakkil Hibatillah, and Ahmad Labib Majdi, "Penafsiran Surat Al- Hujurāt Ayat 6 Tentang Tabayyun Dalam Perspektif Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed," *Irfani* 3, no. 1 (2024): 76–101.

¹² Asep Aburrohman, "Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 17, no. 1 (2018): 65–88.

memperluas makna *tabayyun* dengan menyoroti konsekuensi sosial yang muncul apabila proses verifikasi diabaikan. Penekanan ini menunjukkan bahwa *tabayyun* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme memperoleh informasi yang benar, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan masyarakat.

Sementara itu, Ibn Kaṣīr dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* menegaskan larangan bersikap tergesa-gesa dalam menerima berita. Menurutnya, informasi yang berasal dari seorang *fāsiq* harus diverifikasi terlebih dahulu karena berpotensi mengandung kesalahan atau kebohongan yang dapat merusak hubungan sosial. Penafsiran Ibn Kaṣīr memperlihatkan bahwa kehati-hatian dalam menerima informasi merupakan bentuk tanggung jawab moral yang harus dimiliki setiap individu agar tidak menimbulkan penyesalan akibat keputusan yang didasarkan pada informasi yang keliru.¹³

Secara umum, ketiga mufasir tersebut memiliki titik temu dalam memandang *tabayyun* sebagai mekanisme verifikasi informasi yang bertujuan menjaga keakuratan berita sebelum dijadikan dasar pengambilan keputusan. Perbedaannya terletak pada aspek yang lebih ditekankan. Al-Ṭabarī menitikberatkan pada kredibilitas sumber informasi, al-Qurṭubī pada dampak sosial dari informasi yang tidak terverifikasi, sedangkan Ibn Kaṣīr menekankan pentingnya kehati-hatian individu dalam menerima dan merespons suatu berita. Perbedaan penekanan tersebut menunjukkan bahwa konsep *tabayyun* dalam tafsir klasik tidak hanya berkaitan dengan proses pemeriksaan informasi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan moral dalam penggunaan informasi.

Berdasarkan sintesis terhadap penafsiran para mufasir klasik, dapat dipahami bahwa proses verifikasi informasi dalam perspektif Al-Qur'an diawali dengan penilaian terhadap kredibilitas sumber informasi, dilanjutkan dengan kehati-hatian dalam menerima berita, serta mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan yang diambil. Jika dikontekstualisasikan

¹³ I Katsir, "Tafsir Ibnu Katsir [Al-Qur'an Interpretation by Ibnu Katsir]," *Mesir: Dar Al Kutub*, 2000.

dengan fenomena media sosial, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan sebagai landasan untuk memeriksa kredibilitas akun, media, maupun sumber digital sebelum menerima atau menyebarkan suatu informasi. Sintesis ini selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan prinsip-prinsip *Qur'anic Verification Framework* pada pembahasan berikutnya.

2. Penafsiran Ulama Kontemporer terhadap Konsep Tabayyun

Dalam tafsir kontemporer, konsep *tabayyun* tidak lagi dipahami semata-mata dalam konteks peristiwa turunnya QS. Al-Hujurat ayat 6, tetapi dikembangkan sebagai prinsip universal yang relevan dalam berbagai bentuk komunikasi. Para mufasir kontemporer menempatkan *tabayyun* sebagai mekanisme verifikasi informasi yang tidak hanya bertujuan menjaga kebenaran suatu berita, tetapi juga membangun tanggung jawab moral dalam kehidupan sosial yang semakin kompleks.

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menjelaskan bahwa perintah *tabayyun* merupakan prinsip dasar dalam membangun masyarakat yang sehat secara sosial dan intelektual. Menurutnya, setiap informasi harus diuji terlebih dahulu sebelum dijadikan dasar penilaian maupun tindakan agar tidak menimbulkan kesalahan yang merugikan pihak lain. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa *tabayyun* tidak hanya dipahami sebagai respons terhadap berita yang dibawa oleh seorang *fāsiq*, tetapi sebagai prinsip yang berlaku terhadap seluruh informasi yang diterima. Dengan demikian, fokus verifikasi tidak hanya terletak pada identitas pembawa berita, tetapi juga pada proses pengujian informasi secara menyeluruh.¹⁴

Pandangan tersebut diperkuat oleh Wahbah al-Zuhailī dalam *Al-Tafsīr al-Munīr*. Ia menekankan bahwa berita yang berasal dari pihak yang belum dapat dipastikan kredibilitasnya harus diperiksa secara cermat agar tidak menimbulkan fitnah maupun kerusakan sosial. Menurutnya, *tabayyun* berfungsi sebagai mekanisme perlindungan masyarakat dari dampak negatif

¹⁴ Riskal Jabir, "PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG TABAYYUN DALAM QS SURAH AL-HUJURAT AYAT 6 PADA KITAB TAFSIR AL-MISBAH" (Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo), 2022).

informasi yang keliru. Penekanan Wahbah al-Zuhaili menunjukkan bahwa proses verifikasi tidak hanya bertujuan menemukan kebenaran informasi, tetapi juga mencegah munculnya konflik sosial akibat penyebaran berita yang belum terbukti.¹⁵

Dibandingkan dengan mufasir klasik yang lebih menekankan konteks historis turunnya ayat dan kredibilitas pembawa berita, mufasir kontemporer cenderung memperluas makna *tabayyun* sebagai prinsip universal dalam komunikasi. Perluasan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 tetap relevan diterapkan dalam berbagai bentuk interaksi sosial, termasuk komunikasi digital yang ditandai oleh arus informasi yang cepat dan masif.

Berdasarkan sintesis terhadap penafsiran para mufasir kontemporer, konsep *tabayyun* tidak lagi dipahami sebatas kewajiban mengklarifikasi berita, tetapi berkembang menjadi mekanisme verifikasi informasi yang mengintegrasikan unsur klarifikasi, validasi fakta, dan tanggung jawab moral dalam penggunaan informasi. Perkembangan makna ini menunjukkan adanya perluasan orientasi dari *tabayyun* sebagai etika sosial menuju *tabayyun* sebagai etika verifikasi informasi yang dapat diterapkan dalam menghadapi fenomena disinformasi di era digital. Sintesis tersebut sekaligus memperkuat hasil analisis mufasir klasik dan menjadi dasar dalam penyusunan *Qur'anic Verification Framework* sebagai model konseptual verifikasi informasi berbasis Al-Qur'an.

B. Sintesis Penafsiran Mufasir: Tabayyun sebagai Etika Verifikasi Informasi

Sintesis terhadap penafsiran Ath-Ṭabarī, Al-Qurṭubī, Ibn Kaṣīr, Wahbah al-Zuhaili, Sayyid Qutb, dan M. Quraish Shihab menunjukkan adanya kesinambungan prinsip dalam memahami *tabayyun* sebagai kewajiban memeriksa informasi sebelum menjadikannya dasar penilaian

¹⁵ Annisa Solihah Nurjannah, Arif Firdausi Nur Romadlon, and Edy Wirastho, "Konsep Friendship Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2025): 842–55.

atau tindakan. Meskipun para mufasir memiliki perbedaan konteks dan corak penafsiran, perbedaan tersebut tidak menunjukkan pertentangan substantif, melainkan memperlihatkan perluasan dimensi makna *tabayyun*. Mufasir klasik lebih banyak menekankan kredibilitas pembawa berita, kehati-hatian dalam menerima informasi, serta akibat sosial dari informasi yang keliru, sedangkan mufasir kontemporer memperluas penerapannya sebagai prinsip universal dalam komunikasi.¹⁶

Perbedaan penekanan tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena menunjukkan bahwa *tabayyun* tidak tepat dipahami hanya sebagai tindakan memeriksa benar atau salahnya suatu berita. Jika verifikasi hanya diarahkan pada isi informasi, maka kredibilitas sumber yang membawa informasi dan konsekuensi penyebarannya dapat terabaikan. Sebaliknya, jika perhatian hanya diberikan kepada sumber, informasi yang berasal dari sumber yang relatif kredibel tetap perlu diperiksa isi dan faktanya. Oleh karena itu, sintesis penafsiran menunjukkan bahwa *tabayyun* memiliki struktur yang lebih utuh: verifikasi dimulai dari sumber, dilanjutkan dengan pemeriksaan informasi, kemudian diarahkan pada validasi fakta, dan akhirnya mempertimbangkan tanggung jawab atas penggunaan serta penyebaran informasi.

Atas dasar sintesis tersebut, penelitian ini merekonstruksi konsep *tabayyun* ke dalam empat prinsip utama, yaitu *source credibility*, *information clarification*, *fact validation*, dan *moral responsibility*. Keempat prinsip tersebut tidak diposisikan sebagai kategori yang berdiri sendiri, melainkan sebagai tahapan yang saling melengkapi. Penempatan secara bertahap ini merupakan hasil analisis penelitian terhadap hubungan antarpesan normatif dalam QS. Al-Hujurat ayat 6: kredibilitas sumber menjadi penyaringan awal, klarifikasi memastikan informasi dipahami secara utuh, validasi fakta menguji kebenaran informasi, sedangkan

¹⁶ Aulia Mustofa and Abdul Matin bin Salman, "Urgensi Tabayyun Sebagai Upaya Pencegahan Disinformasi (Hoax) Agama Menurut QS Al-Isra Ayat 36 Dan QS Al-Hujurat Ayat 6: Analisis Tafsir Maudhu'i," *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an Dan Hadits* 5, no. 1 (2026): 188–203.

tanggung jawab moral menentukan apakah informasi yang telah diperiksa layak diterima atau disebarluaskan. Dengan konstruksi tersebut, *tabayyun* dapat dipahami sebagai proses verifikasi yang sekaligus memiliki dimensi epistemologis dan etis.

1. Kredibilitas Sumber (*Source Credibility*)

Prinsip pertama yang dapat disintesis dari QS. Al-Hujurat ayat 6 adalah perhatian terhadap kredibilitas sumber informasi. Para mufasir menempatkan istilah *fāsiq* sebagai indikator penting dalam menilai tingkat kepercayaan terhadap suatu berita. Ath-Ṭabarī, Al-Qurṭubī, dan Ibn Kaṣīr menegaskan bahwa berita dari sumber yang tidak memiliki integritas tidak boleh diterima secara langsung tanpa pemeriksaan, sedangkan Wahbah al-Zuhailī dan M. Quraish Shihab memperluas prinsip tersebut sebagai nilai universal yang dapat diterapkan dalam berbagai bentuk komunikasi.

Secara analitis, penempatan kredibilitas sumber sebagai tahap pertama bukan berarti bahwa identitas sumber dapat menentukan kebenaran informasi secara mutlak. Kredibilitas hanya berfungsi sebagai penyaring awal untuk menentukan tingkat kehati-hatian yang diperlukan dalam memproses suatu informasi. Sumber yang kredibel dapat meningkatkan tingkat kepercayaan awal, tetapi tidak menjadikan isi informasi otomatis benar. Sebaliknya, sumber yang tidak kredibel meningkatkan kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian, prinsip *source credibility* dalam *Qur'anic Verification Framework* berfungsi sebagai titik awal untuk mengurangi risiko penerimaan informasi secara gegabah, bukan sebagai pengganti pemeriksaan terhadap isi dan fakta.

Dalam konteks media sosial, prinsip ini dapat diterapkan dengan memeriksa identitas akun, rekam jejak sumber, otoritas pihak yang menyampaikan informasi, serta konsistensi sumber tersebut dalam menyampaikan informasi. Analisis ini menunjukkan bahwa *tabayyun* menuntut pengguna untuk tidak memberikan kepercayaan secara otomatis hanya karena suatu informasi terlihat meyakinkan atau telah banyak

dibagikan. Kredibilitas sumber menjadi dasar untuk menentukan tingkat verifikasi yang diperlukan sebelum informasi diproses lebih lanjut.¹⁷

2. Klarifikasi Informasi (*Information Clarification*)

Prinsip kedua adalah *information clarification*, yaitu proses memahami dan memeriksa informasi secara utuh sebelum menarik kesimpulan. Sintesis terhadap penafsiran Ath-Ṭabarī, Al-Qurṭubī, Ibn Kaṣīr, Wahbah al-Zuhailī, dan M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa perintah *fatabayyanū* menuntut seseorang untuk tidak menerima berita secara tergesa-gesa, tetapi melakukan penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu.

Dalam konstruksi penelitian ini, klarifikasi memiliki fungsi yang berbeda dari validasi fakta. Klarifikasi diarahkan untuk memahami apa yang sebenarnya dikatakan oleh informasi, sedangkan validasi diarahkan untuk menguji apakah informasi tersebut sesuai dengan fakta. Perbedaan ini penting karena suatu informasi dapat disampaikan oleh sumber yang kredibel dan tampak benar, tetapi menjadi menyesatkan apabila konteks, waktu, objek, atau maksud informasinya tidak dipahami secara utuh. Dengan demikian, klarifikasi merupakan tahap untuk mencegah kesalahan pemahaman sebelum informasi diuji secara faktual.¹⁸

Pada media sosial, tahap ini dapat dilakukan dengan membaca informasi secara lengkap, menelusuri konteks asli, membandingkan beberapa sumber, serta memeriksa apakah suatu pernyataan telah dipotong, dilepaskan dari konteks, atau dipahami secara keliru. Dari perspektif *tabayyun*, tindakan tersebut menunjukkan bahwa verifikasi bukan sekadar mencari informasi tambahan, tetapi merupakan proses membangun pemahaman yang tepat terhadap informasi yang sedang diperiksa.

3. Validasi Fakta (*Fact Validation*)

¹⁷ Muhammad Mirwan Apriandi et al., “Kredibilitas Sumber Ilmiah Di Era Digital,” *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan* 5, no. 3 (2024): 1197–1202.

¹⁸ Ricky Firmansyah, “Web Klarifikasi Berita Untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Hoax,” *Jurnal Informatika* 4, no. 2 (2017): 230–35.

Setelah sumber dan isi informasi diperiksa, tahap berikutnya adalah *fact validation*, yaitu memastikan kesesuaian informasi dengan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini merupakan konsekuensi logis dari perintah *tabayyun* untuk tidak menjadikan berita yang belum jelas kebenarannya sebagai dasar penilaian maupun tindakan. Dalam sintesis mufasir klasik dan kontemporer, pemeriksaan informasi tidak berhenti pada penerimaan atau pemahaman berita, tetapi mengarah pada upaya memastikan kebenarannya.

Secara konseptual, *fact validation* berbeda dari *information clarification*. Klarifikasi menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai suatu informasi, sedangkan validasi menentukan apakah informasi tersebut memiliki kesesuaian dengan fakta. Karena itu, informasi yang telah dipahami dengan benar masih belum dapat dianggap benar secara faktual sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap bukti atau data yang relevan. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa *tabayyun* mengandung dimensi epistemologis yang menuntut adanya dasar sebelum suatu informasi dipercaya.¹⁹

Dalam konteks digital, validasi dapat dilakukan melalui perbandingan dengan sumber resmi, data yang dapat diverifikasi, sumber primer, maupun layanan pemeriksa fakta. Namun, penggunaan perangkat verifikasi tersebut dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai bagian dari tafsir ayat secara langsung, melainkan sebagai bentuk aktualisasi prinsip *tabayyun* dalam lingkungan komunikasi digital. Dengan demikian, *fact validation* menjadi tahap yang menjembatani prinsip Qur'ani dengan kebutuhan praktis verifikasi informasi pada era digital.

4. Tanggung Jawab Moral (*Moral Responsibility*)

Tahap terakhir dalam *Qur'anic Verification Framework* adalah *moral responsibility*. Prinsip ini menunjukkan bahwa keberhasilan verifikasi tidak hanya diukur dari kemampuan seseorang menemukan

¹⁹ M Tamrin Junaidi et al., "Analisis Kritis Validasi Dan Evaluasi Informasi Digital," *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 11, no. 02 (2025): 1–10.

informasi yang benar, tetapi juga dari keputusan moral mengenai apa yang dilakukan terhadap informasi tersebut. Penafsiran Al-Qurtubī mengenai dampak sosial informasi yang tidak terverifikasi serta penekanan Ibn Kaṣīr terhadap kehati-hatian agar tidak menimbulkan penyesalan menunjukkan bahwa penggunaan informasi memiliki konsekuensi terhadap pihak lain.

Penempatan *moral responsibility* sebagai tahap terakhir memiliki alasan konseptual. Tanggung jawab moral menjadi titik pengambilan keputusan setelah seseorang memiliki dasar yang cukup mengenai sumber, konteks, dan validitas informasi. Dengan demikian, seseorang tidak hanya bertanya apakah informasi tersebut benar, tetapi juga apakah informasi tersebut perlu disebarluaskan, kepada siapa, dalam konteks apa, dan apa dampak yang mungkin ditimbulkannya. Posisi ini memperluas orientasi verifikasi dari sekadar memperoleh kebenaran menuju penggunaan kebenaran secara bertanggung jawab.

Dalam konstruksi penelitian ini, *moral responsibility* tidak diposisikan sebagai unsur tambahan yang berada di luar proses verifikasi, tetapi sebagai konsekuensi etis dari seluruh tahapan sebelumnya. Informasi yang telah terbukti benar sekalipun tidak selalu berarti layak disebarluaskan tanpa pertimbangan. Karena itu, verifikasi yang berlandaskan *tabayyun* mencapai tahap akhirnya ketika seseorang mampu menghubungkan kebenaran informasi dengan tanggung jawab atas dampak penggunaannya. Dengan demikian, keberadaan *moral responsibility* menjadi pembeda penting *Qur'anic Verification Framework* dari pendekatan verifikasi yang hanya berorientasi pada akurasi informasi.

Berdasarkan sintesis terhadap keempat prinsip tersebut, *source credibility*, *information clarification*, *fact validation*, dan *moral responsibility* tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk rangkaian verifikasi yang saling melengkapi. *Source credibility* menjadi tahap awal untuk menilai kelayakan sumber, *information clarification* memastikan informasi dipahami secara utuh dan sesuai konteks, *fact validation* menguji kesesuaiannya dengan fakta, sedangkan *moral responsibility* mengarahkan

penggunaan dan penyebaran informasi secara bertanggung jawab. Keterkaitan tersebut menjadi dasar konseptual bagi formulasi *Qur'anic Verification Framework* sebagai hasil rekonstruksi terhadap QS. Al-Hujurat ayat 6. Framework tersebut menempatkan *tabayyun* sebagai proses verifikasi yang sistematis, mulai dari penilaian sumber, pemahaman informasi, pengujian fakta, hingga pertimbangan tanggung jawab penyebaran.²⁰

C. Relevansi Tabayyun terhadap Disinformasi di Media Sosial

1. Tabayyun dan Fenomena Disinformasi

Disinformasi di media sosial tidak hanya berkaitan dengan keberadaan informasi yang salah, tetapi juga dengan perilaku pengguna yang menerima dan menyebarkan informasi tanpa proses verifikasi yang memadai. Kecepatan arus informasi, tingginya interaksi pengguna, dan mudahnya suatu konten dibagikan dapat menyebabkan informasi diterima berdasarkan popularitas atau tampilan yang meyakinkan, bukan berdasarkan kredibilitas sumber dan kebenaran isinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan disinformasi tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis dalam mengakses informasi, tetapi juga kemampuan untuk memeriksa dan menilai informasi secara kritis.²¹

Dalam konteks tersebut, *tabayyun* memiliki relevansi sebagai landasan etis dan epistemologis dalam menghadapi disinformasi. Prinsip-prinsip yang dihasilkan dari sintesis penafsiran pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa proses menerima informasi perlu disertai pemeriksaan terhadap sumber, pemahaman terhadap isi dan konteks, pengujian fakta, serta pertimbangan terhadap dampak penyebarannya. Dengan demikian, *tabayyun* tidak hanya berfungsi untuk menentukan benar atau salahnya suatu informasi, tetapi juga membentuk sikap kritis dan bertanggung jawab dalam memproses informasi di media sosial.

²⁰ Yermias Jena, "Membela Tanggung Jawab Moral," *Respons: Jurnal Etika Sosial* 15, no. 01 (2010): 113–30.

²¹ Maimanah Maimanah, Nurdiani Nurdiani, and Indra Suardi, "Konsep Tabayyun Dalam Konteks Media Sosial (Analisis Ayat Ayat Verifikasi Informasi Menurut Wahbah Az-Zuhayli Dalam Tafsir Al-Munir)," *Mudabbir: Journal Research and Education Studies* 5, no. 2 (2025): 878–84.

2. Implementasi Nilai *Tabayyun* dalam Literasi Digital

Implementasi nilai *tabayyun* dalam literasi digital dapat diarahkan pada pembentukan kebiasaan verifikasi sebelum informasi diterima, digunakan, atau disebarluaskan. Pengguna media sosial perlu membiasakan diri memeriksa sumber informasi, memahami konteks secara utuh, membandingkan informasi dengan sumber yang dapat dipercaya, serta memastikan fakta sebelum mengambil keputusan atau membagikannya kepada orang lain. Proses tersebut menjadikan *tabayyun* sebagai praktik yang dapat mendukung terbentuknya perilaku bermedia sosial yang lebih kritis dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, literasi digital dalam perspektif *tabayyun* tidak hanya berorientasi pada kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga pada pembentukan karakter pengguna yang berorientasi pada kebenaran dan kemaslahatan. Nilai *tabayyun* dapat menjadi landasan konseptual bagi pengembangan etika digital Islam yang menghubungkan kemampuan memverifikasi informasi dengan tanggung jawab moral dalam penggunaannya. Namun, relevansi tersebut masih berada pada tingkat konseptual karena penelitian ini belum menguji penerapan *Qur'anic Verification Framework* secara empiris pada perilaku pengguna media sosial.²²

D. *Qur'anic Verification Framework*: Model Konseptual Verifikasi Informasi Berdasarkan QS. Al-Hujurat Ayat 6

Berdasarkan sintesis terhadap penafsiran mufasir klasik dan kontemporer yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penelitian ini menemukan bahwa konsep *tabayyun* dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 dapat direkonstruksi sebagai proses verifikasi informasi yang memiliki tahapan saling berkaitan. Empat prinsip yang dihasilkan, yaitu *source credibility*, *information clarification*, *fact validation*, dan *moral responsibility*, tidak diposisikan sebagai nilai yang berdiri

²² Nurrohim, *Ilmu Tafsir*.

sendiri, tetapi sebagai rangkaian yang membentuk suatu proses verifikasi informasi.

Atas dasar hubungan tersebut, penelitian ini memformulasikan *Qur'anic Verification Framework* sebagai model konseptual verifikasi informasi berbasis QS. Al-Hujurat ayat 6. Framework ini menggambarkan proses verifikasi yang dimulai dari penilaian kredibilitas sumber, dilanjutkan dengan klarifikasi informasi, validasi fakta, dan diakhiri dengan pertimbangan tanggung jawab moral sebelum informasi digunakan atau disebarluaskan. Formulasi ini menunjukkan bahwa *tabayyun* tidak hanya berfungsi sebagai prinsip kehati-hatian dalam menerima berita, tetapi dapat dikembangkan sebagai mekanisme verifikasi yang mengintegrasikan pemeriksaan informasi dan tanggung jawab etis.²³

Tabel 1. *Qur'anic Verification Framework*

Komponen	Fungsi Verifikasi	Implementasi Media Sosial
<i>Source Credibility</i> (Kredibilitas Sumber)	Memastikan kredibilitas sumber	Memeriksa identitas dan rekam jejak sumber
<i>Information Clarification</i> (Klarifikasi Informasi)	Memahami informasi dan konteks	Menelusuri konteks dan melakukan klarifikasi
<i>Fact Validation</i> (Validasi Fakta)	Memastikan kesesuaian dengan fakta	Membandingkan dengan data/bukti terpercaya
<i>Moral Responsibility</i> (Tanggung Jawab Moral)	Mempertimbangkan dampak penyebaran	Tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi

Berikut tahap *Qur'anic Verification Framework*

1) *Qs. Al-Hujurat Ayat 6*

²³ Saqib Hakak et al., "A Framework for Authentication of Digital Quran," in *Information Systems Design and Intelligent Applications: Proceedings of Fourth International Conference INDIA 2017* (Springer, 2018), 752–64.

- 2) *Tabayyun*
- 3) *Source Credibility*
- 4) *Evaluasi Sumber*
- 5) *Information Clarification*
- 6) *Klarifikasi Isi/Konteks*
- 7) *Fact Validation*
- 8) *Validasi Fakta/Bukti*
- 9) *Moral Responsibility Tanggung Jawab Moral*
- 10) *Penyebaran Informasi Secara Bertanggung Jawab*

Berdasarkan tahapan dalam *Qur'anic Verification Framework* menempatkan *tabayyun* sebagai proses verifikasi yang berlangsung secara bertahap. Proses dimulai dengan *source credibility* untuk menilai kelayakan sumber informasi, kemudian *information clarification* untuk memastikan informasi dipahami secara utuh dan sesuai konteks. Informasi yang telah diklarifikasi selanjutnya diuji melalui *fact validation* untuk memastikan kesesuaiannya dengan fakta atau bukti yang tersedia. Tahap terakhir adalah *moral responsibility*, yaitu mempertimbangkan dampak dan tanggung jawab sebelum informasi disebarluaskan. Dengan demikian, keempat komponen tersebut membentuk satu rangkaian yang menghubungkan pemeriksaan kebenaran informasi dengan tanggung jawab dalam penyebarannya.

E. Analisis dan Implikasi Qur'anic Verification Framework

Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan *Qur'anic Verification Framework* sebagai hasil sintesis penafsiran mufasir klasik dan kontemporer terhadap QS. Al-Hujurat ayat 6. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang cenderung menempatkan *tabayyun* sebagai prinsip etika komunikasi, kehati-hatian dalam menerima berita, atau bagian dari literasi digital, penelitian ini merekonstruksi *tabayyun* menjadi kerangka verifikasi informasi melalui integrasi *source credibility*, *information clarification*, *fact validation*, dan *moral responsibility*. Kebaruan tersebut tidak semata-mata terletak pada identifikasi keempat prinsip, tetapi pada rekonstruksi hubungan

antarkeempatnya sebagai satu proses verifikasi informasi yang sistematis dan berbasis Al-Qur'an.

Perbedaan *Qur'anic Verification Framework* dengan pendekatan verifikasi informasi sebelumnya terletak pada integrasi dimensi epistemologis dan etis dalam satu proses. Pendekatan verifikasi informasi umumnya menitikberatkan pada pemeriksaan akurasi atau kebenaran informasi, sedangkan framework ini memperluas proses tersebut melalui penilaian sumber, klarifikasi informasi, dan validasi fakta yang kemudian diikuti oleh *moral responsibility*. Dengan demikian, verifikasi tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu informasi benar atau salah, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana informasi diperoleh, dipahami, diuji, dan digunakan secara bertanggung jawab. Integrasi inilah yang menjadi karakter pembeda utama framework yang ditawarkan.²⁴

Kontribusi penelitian ini terletak pada dua aspek. Secara akademik, penelitian ini memperluas kajian tafsir tematik dengan menunjukkan bahwa QS. Al-Hujurat ayat 6 dapat disintesis dari berbagai perspektif mufasir untuk menghasilkan konstruksi konseptual yang relevan dengan persoalan komunikasi digital. Secara konseptual, *Qur'anic Verification Framework* menghubungkan proses epistemik dalam pemeriksaan informasi dengan tanggung jawab etis dalam penggunaannya. Dengan demikian, framework ini memberikan perspektif berbasis Al-Qur'an bagi pengembangan kajian verifikasi informasi, etika komunikasi, dan literasi digital Islam dalam merespons disinformasi.

Implikasi *Qur'anic Verification Framework* menunjukkan bahwa penerapan nilai *tabayyun* dalam konteks digital dapat diarahkan pada pembentukan budaya verifikasi yang menyeimbangkan ketepatan informasi dan tanggung jawab moral. Framework ini dapat menjadi landasan konseptual untuk

²⁴ Atik Santika, Sazkya Mutaabidah, and Yayat Hidayat, "The Epistemological Framework of Islamic Education: Pedagogical Implications of the Authority of the Sunnah and Its Relationship with the Qur'an.," n.d.

mengembangkan literasi digital Islam yang mendorong pengguna memeriksa sumber, memahami informasi secara utuh, memvalidasi fakta, serta mempertimbangkan dampak sebelum menyebarkannya. Namun, penelitian ini masih berada pada tingkat konseptual dan belum menguji efektivitas framework secara empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan indikator dan instrumen berdasarkan keempat prinsip tersebut serta menguji penerapannya pada perilaku pengguna atau lingkungan media digital.²⁵

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa *tabayyun* dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 dapat dipahami sebagai proses verifikasi informasi yang sistematis dan etis. Sintesis penafsiran mufasir klasik dan kontemporer menghasilkan empat prinsip utama, yaitu *source credibility*, *information clarification*, *fact validation*, dan *moral responsibility*. Keempat prinsip tersebut menjadi dasar perumusan *Qur'anic Verification Framework* sebagai model konseptual verifikasi informasi berbasis Al-Qur'an, mulai dari penilaian sumber, pemahaman dan klarifikasi informasi, pengujian fakta, hingga pertimbangan etis sebelum informasi disebarluaskan.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada formulasi *Qur'anic Verification Framework* yang mengintegrasikan dimensi epistemologis dan etis dalam satu kerangka verifikasi. Framework ini memperluas kajian tafsir tematik sekaligus memberikan landasan konseptual bagi pengembangan etika komunikasi dan literasi digital Islam dalam merespons disinformasi di media sosial.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena *Qur'anic Verification Framework* masih berada pada tataran konseptual dan belum diuji secara empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan indikator dan instrumen berdasarkan framework tersebut serta menguji penerapan dan efektivitasnya pada konteks media digital.

²⁵ Egi Tanadi Taufik, "NEW FACE OF RELIGIOUS AFFAIR MINISTER AND THE EPISTEMOLOGY OF QUR'ANIC ETHICS: A SYNCHRONIC-DIACHRONIC READING ON QS. AL-HUJURĀT (49): 11-13.," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 21, no. 1 (2021): 1.

Daftar Pustaka

- Aburrohman, Asep. "Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 17, no. 1 (2018): 65–88.
- Afifah, Amalia Naim, Ahmad Nurrohim, Kharis Nugroho, Yeti Dahliana, and Andri Nirwana AN. "Transformation of Al-Qur'an Interpretation in the Digital Era: A Comparative Analysis Study of the Content of the Altafsir. Com Website with the Al-Qur'an Al-Hadi Website." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 8, no. 1 (2025): 1047–68.
- Allcott, Hunt, and Matthew Gentzkow. "Social Media and Fake News in the 2016 Election." *Journal of Economic Perspectives* 31, no. 2 (2017): 211–36.
- Apriandi, Muhammad Mirwan, Donna Boedi Maritasari, Baiq Zil An'gina Maulida, and Ilma Karmila. "Kredibilitas Sumber Ilmiah Di Era Digital." *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan* 5, no. 3 (2024): 1197–1202.
- Fauzi, Paris Ahmad, Hammad Mutawakkil Hibatillah, and Ahmad Labib Majdi. "Penafsiran Surat Al- Hujurāt Ayat 6 Tentang Tabayyun Dalam Perspektif Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed." *'Irfani* 3, no. 1 (2024): 76–101.
- Firmansyah, Ricky. "Web Klarifikasi Berita Untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Hoax." *Jurnal Informatika* 4, no. 2 (2017): 230–35.
- Floridi, Luciano. *The Ethics of Information*. Oxford University Press (UK), 2013.
- Hakak, Saqib, Amirrudin Kamsin, Jhon Veri, Rajab Ritonga, and Tutut Herawan. "A Framework for Authentication of Digital Quran." In *Information Systems Design and Intelligent Applications: Proceedings of Fourth International Conference INDIA 2017*, 752–64. Springer, 2018.
- Hanifah, Nur. "Metodologi Tafsir Tematik." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 9, no. 2 (2024): 71–83.
- Iqbal, Ipmawan Muhammad, Aulia Nurul, and Siti Rokhani. "Penafsiran Tabayyun Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Mishbah." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4523–32.
- Jabir, Riskal. "PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG TABAYYUN DALAM QS SURAH AL-HUJURAT AYAT 6 PADA KITAB TAFSIR AL-MISBAH." Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo), 2022.
- Jena, Yeremias. "Membela Tanggung Jawab Moral." *Respons: Jurnal Etika Sosial* 15, no. 01 (2010): 113–30.
- Junaidi, M Tamrin, Nadia Zakiatul Mutiah, Jamal Jabarpaj, Salwa Az-Zahra, and

- Eva Iryani. "Analisis Kritis Validasi Dan Evaluasi Informasi Digital." *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 11, no. 02 (2025): 1–10.
- Katsir, I. "Tafsir Ibnu Katsir [Al-Qur'an Interpretation by Ibnu Katsir]." *Mesir: Dar Al Kutub*, 2000.
- Maimanah, Maimanah, Nurdiani Nurdiani, and Indra Suardi. "Konsep Tabayyun Dalam Konteks Media Sosial (Analisis Ayat Ayat Verifikasi Informasi Menurut Wahbah Az-Zuhayli Dalam Tafsir Al-Munir)." *Mudabbir: Journal Research and Education Studies* 5, no. 2 (2025): 878–84.
- Mustofa, Aulia, and Abdul Matin bin Salman. "Urgensi Tabayyun Sebagai Upaya Pencegahan Disinformasi (Hoax) Agama Menurut QS Al-Isra Ayat 36 Dan QS Al-Hujurat Ayat 6: Analisis Tafsir Maudhu'i." *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an Dan Hadits* 5, no. 1 (2026): 188–203.
- Nurjannah, Annisa Solihah, Arif Firdausi Nur Romadlon, and Edy Wirastho. "Konsep Friendship Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2025): 842–55.
- Nurrohim, Ahmad. *Ilmu Tafsir*. Muhammadiyah University Press, 2024.
- Santika, Atik, Sazkya Mutaabidah, and Yayat Hidayat. "The Epistemological Framework of Islamic Education: Pedagogical Implications of the Authority of the Sunnah and Its Relationship with the Qur'an." n.d.
- Shihab, M Quraish. "Tafsir Al-Misbah." *Jakarta: Lentera Hati* 2 (2002): 52–54.
- Sukmaningtyas, Anisa Nur Izzati, Ahmad Nurrohim, Asda Amatullah, Fathimah Salma Az-Zahra, Ammar Muhammad Jundy, Tiffani Lovely, and Muhammad Syahidul Haqq. "Etika Komunikasi Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Komunikasi Di Zaman Modern." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 556–76.
- Taufik, Egi Tanadi. "NEW FACE OF RELIGIOUS AFFAIR MINISTER AND THE EPISTEMOLOGY OF QUR'ANIC ETHICS: A SYNCHRONIC-DIACHRONIC READING ON QS. AL-HUJURĀT (49): 11-13." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 21, no. 1 (2021): 1.
- Wardle, Claire, and Hossein Derakhshan. *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policymaking*. Vol. 27. Council of Europe Strasbourg, 2017.